DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afriansyah, Arie. *Aspek Hukum Reklamasi di Wilayah Tanah Reklamasi dan Laut.* Jakarta: Jurnal Hukum Lingkungan, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Bagir Manan. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: FH UII Press, 1993.

Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2009.

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya.* Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan, 2005.

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2018.

Budiono, Abdul Rachmad. *Konflik Kewenangan Agraria dan Kelautan: Studi Kritis terhadap Wilayah Tanah Reklamasi.* Jurnal Hukum IUS, Vol. 7 No. 3 (2019).

Dharsana, I Made Pria. “Sertifikasi Tanah Tanah Reklamasi dan Pulau Kecil: Peran PPAT dalam Tata Kelola Wilayah Perairan.” *Webinar Nasional Hukum Pertanahan dan Tanah Reklamasi,* 2021.

Djatmiati, Tatik Sri. *Argumentasi Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2014.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law.* New Haven: Yale University Press, 1964.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harris, Freddy. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pertanahan Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2015.

Hendrik, Nico N. *Hukum Administrasi Negara Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Prenada Media, 2016.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State.* Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law.* Berkeley: University of California Press, 1967.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Manan, Nandang Sutrisno. *Hukum Tata Kelola Sumber Daya Alam: Harmonisasi Kewenangan antara Pusat dan Daerah.* Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta: Kompas, 2005.

Maria S.W. Sumardjono. *Menuju Pengelolaan Pertanahan yang Adil dan Berkelanjutan.* Yogyakarta: FH UGM Press, 2010.

Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.* Jakarta: Kompas, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Progresif.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy.* New York: Oxford University Press, 1950.

Rajagukguk, Erman. "Harmonisasi Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 32 No. 2 (2002).

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Sahetapy, J.E. *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Tata Pemerintahan Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah.* Jakarta: Kencana, 2020.

Satria, Arif. *Tanah Reklamasi dan Laut untuk Rakyat: Sebuah Refleksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.* Jakarta: IPB Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2009.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta: Kompas, 2005.

Tatik Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2014.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Yunus, Hadi Sabari. *Manajemen Wilayah Tanah Reklamasi: Perspektif Tata Ruang dan Lingkungan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Zakaria, Ando. *Pluralisme Hukum dan Pemerintahan Kolaboratif.* Jakarta: Epistema Institute, 2016.

B. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Afriansyah, Arie. “Aspek Hukum Reklamasi di Wilayah Tanah Reklamasi dan Laut.” *Jurnal Hukum Lingkungan,* Vol. 8 No. 1 (2019): 19.

Arsana, I Gede. “Kebijakan Pengelolaan Wilayah Tanah Reklamasi dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Vol. 26 No. 1 (2019): 88.

Dharsana, I Made Pria. “Sertifikasi Tanah Tanah Reklamasi dan Pulau Kecil: Peran PPAT dalam Tata Kelola Wilayah Perairan.” *Webinar Nasional Hukum Pertanahan dan Tanah Reklamasi,* 2021.

Lathifah Harum. “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Hasil Reklamasi dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Vol. 28 No. 4 (2021): 723.

Lifante-Vidal, Isabel. “Is Legal Certainty a Formal Value?” *Jurisprudence Journal,* University of Alicante, 2020.

Nurjaya, I Nyoman. “Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Ekologis.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 48 No. 2 (2018): 124.

Nurjaya, I Nyoman. “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Tanah Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 47 No. 3 (2017): 387.

Sudjito, Arie. “Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang dan Agraria di Wilayah Tanah Reklamasi.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik,* Vol. 12 No. 1 (2020): 33.

Trijono, Wahyu. “Koordinasi Antarinstansi dalam Pengelolaan Wilayah Tanah Reklamasi: Problematika dan Solusi.” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan,* Vol. 5 No. 2 (2020): 201.

Wibisana, Andri. “The Development of the Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law.” *Asia Pacific Journal of Environmental Law,* Vol. 14 No. 1-2 (2011): 145.

Yuniarti. “Implementasi Rencana Zonasi Wilayah Tanah Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 50 No. 3 (2020): 357.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

DPR RI. *Risalah Rapat Komisi II tentang Permasalahan Sertifikat Tanah Reklamasi di Kota Makassar.* Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Laporan Hasil Audit Internal Sertifikasi Lahan Reklamasi Kota Makassar.* Jakarta: Inspektorat Jenderal ATR/BPN, 2024.

Kementerian ATR/BPN. *Pedoman Integrasi Zonasi dan Pertanahan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 2023.

Kementerian ATR/BPN. *Laporan Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah di Wilayah Reklamasi Kota Makassar.* Jakarta: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Laporan Pembangunan Kawasan Center Point of Indonesia (CPI).* Makassar: Dinas Penataan Ruang Sulsel, 2023.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Tanah Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Tanah Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan, dan/atau Peraturan Zonasi.*

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Tanah Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil.*

D. Website dan Sumber Internet

Bappenas. "*Evaluasi Zonasi Wilayah Tanah Reklamasi.*" 2022.

Detiknews.com. "Komisi II DPR Desak BPN Cabut Sertifikat di Laut Makassar." 3 Januari 2025. https://news.detik.com/berita/d-7632990/komisi-ii-desak-bpn-cabut-sertifikat-laut.

Kompas.com. "BPN Terbitkan 46 Sertifikat di Atas Laut, DPR Minta Audit." 20 November 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/bpn-terbitkan-46-sertifikat-laut-makassar.

M Ambari, *Perlu Sinkronisasi Tata Ruang Laut dan Darat*, Mongabay, https://mongabay.co.id/2025/08/10/pekerjaan-rumah-sinkronisasi-tata-ruang-laut-dan-darat/, 10 Agustus 2025

Ruminews.id. "Reklamasi Laut Makassar Disorot: Pemprov dan ATR/BPN Diduga Langgar Aturan." 29 Januari 2025. https://ruminews.id/2025/01/29/reklamasi-laut-makassar-disorot-pemprov-dan-atr-bpn-diduga-langgar-aturan.

TribunMakassar.com. "BPN Cabut 50 Sertifikat di Atas Laut CPI Makassar." 5 Februari 2025. https://makassar.tribunnews.com/2025/02/05/bpn-cabut-50-sertifikat-cpi.